

Sukiman dan Sri Widagdo: Hidup di antara Dua Pilihan, Kelestarian Lingkungan dan Bonanza Butir Pasir¹

Junnio Chelsa Putra Setyana

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
junniochelsaputrasetyana2603@mail.ugm.ac.id

Aina Ainul Masruroh

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
ainaaainulmasruroh2005@mail.ugm.ac.id

Narasumber 1: Sukiman

Pendahuluan

Sukiman Mohtar Pratomo, atau yang kerap dipanggil Sukiman merupakan seorang petani sekaligus pemilik UMKM Kopi Petruk. Bertempat tinggal di Deles, RT 27/RW 009, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang terletak dekat Gunung Merapi. Beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat yang banyak berfokus pada penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, koperasi, dan kewirausahaan masyarakat. Beliau terlibat sebagai koordinator Jalin Merapi, ketua dari Lintas Merapi, ketua dari Pokdarwis, juga anggota dari Kelompok Tani Hutan serta Tagana. Selain itu, beliau juga turut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai Ketua Pokja Kampung KB. Kedekatan tempat tinggal beliau dengan Gunung Merapi serta keaktifan beliau dalam penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat, membuat beliau menyadari bahwa dampak dari letusan Gunung Merapi tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga menghasilkan sumber tambang berupa pasir sehingga mendorong banyak pihak untuk mengeruknya. Meskipun demikian, secara tegas beliau tidak ikut dalam kegiatan tambang. Oleh karena itu, dengan mengingat posisi beliau sebagai salah satu tokoh masyarakat dalam penanggulangan bencana dan dapat mewakili suara masyarakat yang berdampingan dengan tambang-tambang di sekitar Gunung Merapi tanpa ikut terlibat dalam penambangannya, maka tim HISTMA kali ini mencoba bertemu sekaligus mewawancarai beliau untuk bertanya terkait pandangannya terhadap tambang.

Melihat banyaknya tambang yang terdapat di sekitar sini, apakah Bapak punya argumen terkait aktivitas tambang yang dilakukan di sini?

Saya sehari-hari memang nggak ikut dalam di kegiatan tambang, tapi bukan anti tambang. Saya paham tentang kerusakan karena tambang, maka saya tidak melakukan itu saja. Kalau dulu saya bisa dikatakan aktif, vokal, demo juga pernah, tapi sekarang sudah lelah karena kebanyakan demo itu ternyata banyak yang memanfaatkan apa yang saya lakukan itu justru malah. Mengenai tambang saya mending mencari solusi yang lain, pilihan lain. Saya menawarkan kepada masyarakat untuk kegiatan lain non-tambang. Ada kegiatan lain

1) Transkrip lengkap dapat menghubungi: histma.ugm@gmail.com

yang juga menghasilkan ekonomi tanpa tambang. Tapi, bukan berarti saya memusuhi tambang. Silahkan saja nambang! Tapi ini lo ada pilihannya. Nah, kegiatan-kegiatan ini makanya mengajak masyarakat untuk ada pilihan lain.

Bagaimana perubahan yang terjadi bagi orang yang bekerja di tambang? Dan apa dampak lain dari aktivitas pertambangan?

Kalau secara ekonomi dulu yang nggak punya apa-apa kemudian menjadi punya. Sedangkan kalau secara sosial banyak yang negatif, banyak juga yang positif. Ada yang kemudian karena belum siap bukan bertambah investasi tapi bertambah istri, juga kehidupan yang glamour artinya bermewah-mewahan. Selain itu, karena belum siap, ketika tambang sudah berhenti atau chaos ada yang sampai bunuh diri. Dampak lainnya, ketimpangan ekonomi yang memengaruhi gotong royong. Jadi, orang-orang kaya sudah mulai serba bayar, tinggal orang-orang kurang mampu ini rombongan yang gotong royong kan gitu. Orang-orang kaya kan malas gotong royong. Kalau dulu masih miskin mau. Kalau sudah punya ya 'saya nggak minta tolong kamu, saya bisa bayar orangnya' nah, gitu kira-kira.

Apakah ada keresahan yang ditimbulkan akibat pertambangan? Apakah aktivitas pertambangan ini terbukti merusak aspal? Bagaimana penyelesaiannya?

Aspal ini rusak parah, dulu sampai tiga tahun lebih. Maka, jalan rusak ini kita demo sampai empat kali ke pemerintah kabupaten. Audiensi kayak gitu. Gara-gara itu dan yang bolong-bolong di bawah itu juga sudah direspon akan dibenahi. Demo bukan ke perusahaan tambang. Kan karena kebijakan, bukan karena mereka lakukan semena-mena mereka tambang itu. Kan karena kebijakan nggak pernah ngatur itu. Kalau pemerintah ngatur, punya otoritas ya. Kalau dia mengatur, ditata benar, yang melaksanakan aturan itu benar pada akhirnya. Contoh muatan nggak boleh berlebihan katanya, nyatanya muatan berlebih nggak ada petugasnya.

Bagaimana dampak sosial tambang bagi anak-anak dan perempuan?

Ada yang sekolah sambil kerja, kemudian yang putus sekolah juga ada, dan di lingkungan itu banyak yang putus sekolah, banyak pernikahan dini, stunting ada. Saya sendiri menjadi ketua Pokja Kampung KB salah satunya Genre juga. Saya di sana. Tetapi tetap saja itu pelan-pelan. Dia harus sebelum nikah punya keterampilan dan sebagainya, itu kan bagian dari program kerjanya juga. Bagaimana jika kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sebagainya jadi programnya. Ya itu, bisanya hanya mengurangi karena kalau tetangganya udah gitu terus berputar dalam lingkaran itu. Ini

butuh proses yang panjang. Harus diputus generasinya ini. Bukan yang sudah terlanjur. Bahkan di kampung tersebut itu ada anak yang harusnya masuk SMP itu nggak bisa baca dan tulis lo. Di Bono. Itu masih panjang. Itu menjadi fokus desa juga. Stunting, pelayanan gizi dan sebagainya di situ semua. Jumlah perceraian juga banyak di situ, pernikahan dini di situ, bahkan kalau ada pemilu itu cari KPPS-nya di situ itu nggak dapat.

Bagaimana warga-warga sini memandang tambang-tambang itu, Pak? Dan bagaimana pandangan pemerintah?

Beda-beda, makanya dinamika di masyarakat itu soal tambang itu beda-beda. Cara ngobrolnya, pokoknya gitu. Lengkaplah. Ada yang pro banget, ada yang pokoknya kalau tambang jangan sampai terhenti, ada yang kayak gitu karena kembali lagi ke mindset, cara berpikir mereka masing-masing termasuk lingkungannya. Ada lingkungan yang pokoknya semuanya tambang alat berat semua. Semua kalau nggak itu resah gitu ada, udah kebingungan gitu. Tapi ada yang satunya lingkungan itu memang tambangnya oke, pertaniannya oke. Ada yang nambang terus tapi dia untuk modal pertaniannya banyak. Kemudian yang saya tau kalau pemerintah tidak semuanya pro tambang, hanya oknum. Tapi kalau secara birokrasi mereka tidak boleh tambang itu, cuman oknum-oknum saja yang bermain. Makanya tidak semuanya pandangannya jelek, tidak semua pro tambang juga. Banyak yang nggak ikut. Apalagi masyarakat yang di bawahnya ini kan mereka nggak nambang tetapi kelewatan, nggak dapat apapun. Tapi itu ya berbeda. Andaikan cara berpikirnya semudah seperti orang di atas ini tetapi dia tinggalnya di bawah, mungkin sudah seperti kami malahan. Mereka gitu diam aja. Kelewatan terus, bising terus, debu tapi nggak dikapak-kapakke (diapa-apain). Kan secara ekonomi nggak dapat apapun. Jadi, jalannya bahkan lebih ramai karena ini dari beberapa jalan itu ngumpul di bawah, jadi satu, lebih ramai di bawah, dampaknya itu.

Narasumber 2: Sri Widagdo

Pendahuluan

Gunung Merapi, gunung berapi aktif dengan ketinggian 2.190 MDPL, termasyhur sebagai destinasi pendakian. Dan pada bagian kakinya, baik dari sisi Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali, banyak dimanfaatkan sebagai destinasi wisata karena keindahan dan kesejukan alamnya. Namun dibalik kemasyhuran jalur pendakiannya dan keeksotisan alamnya, kaki gunung Merapi juga menyimpan potensi kandungan sumber daya mineral yang kaya, yakni pasir. Potensi pasir yang melimpah dengan demikian membuat orang-orang atau pihak-pihak tertentu memanfaatkannya untuk ditambang dan dijual ke berbagai kota. Salah satu orang yang ikut memanfaatkan pasir Merapi tersebut ialah Sri Widagdo, atau yang akrab dipanggil Dagdo, yang beralamat di Dukuh Deles, RT 021/ RW 009, Desa Sidorejo, Kecamatan

Kemalang, Kabupaten Klaten. Pria kelahiran Klaten, 9 September 1978 tersebut pada awalnya bekerja sebagai Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Desa di Desa Sidorejo. Setelah tidak menjabat sebagai perangkat desa, beliau terjun menjadi operator tambang pasir di Desa Sidorejo sejak dua setengah tahun belakangan ini dengan memakai sistem rekanaan. Baginya, tambang pasir yang ada di Desa Sidorejo dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni tambang yang menggunakan alat berat dan manual. Keduanya mempunyai cerita perjalanan yang panjang dengan dinamika kompleks yang melingkupinya. Penambangan pasir sendiri dikatakannya telah membawa rejeki nomplok bagi masyarakat yang terjun ke dalamnya. Oleh karena itu, tim HISTMA kali ini berkesempatan untuk bertemu dan mewawancarai beliau guna melacak ihwal kronologi dan mekanisme penambangan pasir serta bonanza keuntungan dari butiran pasir.

Mungkin yang ingin kami tanyakan terlebih dahulu, permulaan tambang pasir di sini itu dari kapan, Pak, baik yang manual dan yang pakai alat berat?

Kalau tambang yang manual itu sebelum tahun 1997, jamannya Pak Harto, sudah ada dan itu ada di Kali Woro. Sedangkan kalau yang menggunakan alat berat, itu sudah lama juga, sekitar tahun 1997, pas krisis moneter. Pada waktu itu di Desa Sidorejo sudah ada 20 titik dan satu titiknya ada 2 sampai 4 alat berat. Saat itu malah perusahaan berbentuk PT sudah melalui mekanisme perizinan resmi. Sampai di tahun 2006 itu juga masih eksis dan melalui proses pengurusan perijinan resmi serta memakai AMDAL juga sampai jangka 3 tahun waktu pengerjaannya. Kemudian, setelah tahun 2010 itu konsesi dari perusahaan sudah berhenti karena wilayah sini ditetapkan sebagai zonasi non tambang. Akan tetapi setelah tahun 2010, di sini ya muncullah tambang-tambang yang rekanaan. Karena saat itu setelah erupsi Merapi, terus ekonomi masyarakat sini mungkin goyah ya, sehingga orang-orang yang punya lahan, yang ada kandungan pasirnya diajak bekerja sama untuk ditambang pasirnya.

Saat sebelum fenomena pertambangan pasir menjadi massif, apa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sini, Pak? Dan ketika terjadi peralihan ke pertambangan, apakah kegiatan ekonomi yang sebelumnya dilakukan masyarakat jadi ditinggalkan?

Kegiatan ekonomi masyarakat sini sebelum itu 90 persennya ya bertani dan beternak. Sedang 10 persennya ada kegiatan tambang di alur Sungai Kali Woro. Kalau pertanian biasanya ya sayur mayur, palawija. Hortikultura gitu pokoknya. Lantas juga ada tanaman musiman seperti tembakau yang baru tanam satu bulanan. Untuk tanaman tembakau itu nanti kami sistemnya jual basah gitu, jadi tidak dirajang-rajang setelah kering. Jadi setelah panen, kita petik lalu kita kirim ke Parakan, Temanggung sana. Kalau tanaman buah di sini mungkin sedikit ya, hanya di pekarangan rumah warga saja.

Sedangkan saat tambang menjadi ramai itu pertanian sama sekali tidak ditinggalkan. Malah kemudian yang keluarga yang sudah berumah tangga, itu malah sama-sama bekerja dan bisa saling membagi waktu. Jadi misal di tambang milik saya itu, malah yang istri yang menjadi coker pasir sedang yang suaminya bekerja di perkebunan sayur dan juga memelihara ternak sapi. Jadi, di sini kalau katakanlah saya punya istri terus duduk manis di rumah saja, tidak mas! Ikut bekerja dan sekarang malah ibu-ibu di sini kerja kerasnya melebihi yang laki-laki.

Kemudian itu bagaimana mekanisme dijalkannya suatu pertambangan pasir yang manual maupun yang berat, Pak? Dan kalau misal Merapi erupsi, itu bagaimana juga proses evakuasi alat beratnya?

Kalau pertambangan yang manual itu yang di Kaliworo itu. Untuk pengelolaan penambangannya dibebaskan dan aktivitasnya biasanya berlangsung selama setengah hari saja, jam setengah enam pagi sampai setengah dua biasanya. Yang penting punya tenaga yang kuat bisa menambang disitu dan nanti keuntungannya ya masuk ke kantong pribadi. Setengah hari saja bisa meraup lima ratusan ribu dan kalau ada lahar dingin, tambang Kali Woro yang untung, yang pakai alat berat malah nggak laku. Tapi tenaganya harus ekstra dan meski begitu kebanyakan yang menambang di sana ibu-ibu. Kalau tambang yang pakai alat berat itu biasanya yang menggunakan sistem kerja sama dengan warga yang punya lahan, terutama warga yang terlilit utang yang besar dan juga erupsi Merapi 2010 yang membuat ekonomi warga goyah, sehingga mereka minta lahan mereka yang ada kandungan pasir supaya ditambang dan itu harus menggunakan alat berat karena ada lapisan tanah yang harus kita singkirkan juga itu nanti kalau pasirnya sudah habis, kami akan mereklamasinya lagi dan akan menanami tanaman keras menurut permintaan yang punya lahan. Cuma bedanya, sebelum 2010 itu bisa mengurus ijin resmi namun setelah itu tidak bisa, karena ya tadi itu, wilayah sini tidak masuk zona pertambangan, sehingga saat kami menambangnya, kami mengajak rekan pihak lain, termasuk tambang yang saya kerjakan. Sedang alat berat yang ada di tambang saya, itu ada dua buah dan itu pribadi. Kemarin-kemarin sempat sewa, 1 alat itu sewanya 45 juta kalau 2 alat berarti 90 juta. Itupun belum BBM dan biaya operatornya. Tentu kalau Merapi erupsi, alat berat akan kita evakuasi. Kemarin itu pas erupsi tahun 2010, alat berat kami evakuasi dan saat status Merapi beberapa waktu lalu itu kembali naik ke level siaga, kami juga memberhentikan aktivitas pertambangan dengan alat beratnya sekalian selama 3 sampai 4 bulan. Itu juga sebagai upaya kami

agar nantinya tidak mengganggu proses evakuasi.

Lantas itu untuk tenaga kerja penambangnya berasal dari mana saja dan bagaimana juga pembagian kerja yang ada di pertambangannya itu, Pak? Kalau boleh tahu berapa gajinya kira-kira, Pak? Terus pasir dari tambang Pak Dagdo itu, dijualnya kemana saja?

Pekerja tambang di sini kebanyakan sudah berumah tangga. Kalau untuk yang mencari dan membelah batu itu dari warga sini, tapi yang dari warga luar juga ada. Menaikkan batu ke truk itu menggunakan sistem shift, misal pagi sampai sore dan keuntungannya bisa sampai 700-800 ribu sehari lho per orangnya. Bagian lainnya ada yang coker pasir yang memuat pasir ke atas truk, DO, jaga portal, kita upayakan memberdayakan masyarakat sini dan kita jadwal pembagiannya sehingga semuanya pasti dapat giliran. Untuk perihal gaji sendiri kita menyesuaikan, apalagi kita kerja sama rekanan ya. Biasanya kita gaji 300 ribu untuk kurun 20 jam. Keuntungan yang diterima biasanya juga berbeda-beda, kita ambil contoh seorang coker itu bisa mengambil keuntungan sampai 1 juta sehari kalo armada tambang lagi rame. Nanti itu kalau ada sisa pasir, dikumpulkan lagi dapat 1 rim lantas dijual, nah itu keuntungannya lebih. Untuk penjualan pasir, kita jualnya bisa sampai ke Semarang, Kudus, dan Demak, terlebih pasir sini kan kualitasnya juga bagus ya. Selain itu, juga ada batu besar item untuk model candi dan juga untuk kebutuhan dapur, ituambilnya juga dari sini dan kita jualnya sampai ke Muntilan sana. Sementara kalo yang dijual terdekat sini ya itu, dijual ke depo-depo yang ada di pinggir jalan.

Soal keuntungannya menambang pasir itu berapa juga nilainya, Pak? Apakah pertambangan juga membawa dampak keresahan dan keluhan warga, misalnya soal jalan rusak karena truk, suara bising, debu jalanan bertaburan?

Untuk keuntungan, Alhamdulillah, ada peningkatan ekonomi secara grafik lah. Penghasilan dari tambang itu kan juga dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak, modal memelihara ternak, untuk beli motor, malahan juga ada yang mempergunakannya membeli tanah baru dan juga dapat digunakan untuk tabungan atau biaya tak terduga gitu. Termasuk warga yang terlilit utang itu, jalan penyelesaiannya ya bisa melalui tambang itu. Terkait dampak truk kepada kondisi jalan, harus dipertanyakan, jalan yang mana dulu? Kalau jalan untuk akses masuk-keluar truk itu kita sewa dari pemilik lahan yang bersertifikat dan untuk biaya sewanya, hitungannya tergantung panjang lebarnya dan juga per armada. Malah kemarin warga yang menyewakan tanahnya untuk jalan armada iu ada yang bisa beli tanah lagi. Terus untuk jalan umum apabila rusak itu nggih menjadi tanggung pemerintah dan

dinas terkait. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah dibangun jalan yang menggunakan aspal cor itu karena lebih awet. Kalau ada jalan rusak karena aktivitas tambang, jangan disalahkan tambangnya, karena tambang sendiri juga ada kontribusi PAD ke pemerintah kabupaten.